

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

3.2 Objek dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Objek

Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono). Dalam konteks penelitian ini, objek penelitian adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara. Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya berada di kecamatan Rantepao. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara No. 4 Tahun 2011, pemerintahan daerah Kabupaten Toraja Utara dipimpin oleh Bupati sebagai kepala daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membentuk peraturan daerah (Perda) dengan persetujuan bersama DPRD dan juga sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai wewenang untuk mengelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

3.2.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian (Arikunto dan Suhardjono). Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder dan mendapatkan data penelitian dari Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sebelumnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diawali oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di tingkat SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), bersama dengan bendahara penerimaan dan pengeluaran, bertanggung jawab mencatat, mengelola, dan menyusun laporan awal, seperti laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Setelah itu, laporan keuangan SKPD disusun oleh tim penyusun laporan keuangan SKPD berdasarkan data transaksi yang diolah oleh PPK-SKPD dan bendahara.

Laporan yang dihasilkan kemudian direkonsiliasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), yang bertugas mengonsolidasikan seluruh laporan keuangan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). BKAD memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan melakukan penyesuaian direvisi oleh Inspektorat Daerah melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang bertugas memeriksa kepatuhan laporan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

Setelah melalui tahap revisi, laporan keuangan diajukan kepada Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk diperiksa, disahkan, dan ditandatangani. Selanjutnya, laporan ini disampaikan ke bupati selaku kepala daerah untuk diteruskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna dilakukan audit. Dengan demikian, alur seperti ini memastikan laporan keuangan daerah disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

3.3 Variabel, Operasionalisasi dan Pengukuran

Variabel merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti yang bervariasi untuk dipelajari dan memperoleh informasi untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu Standar Akuntansi Pemerintah sebagai variabel independen dan Akuntabilitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen.

3.3.1 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah kebijakan, aturan, dan prosedur akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencatat, melaporkan, dan mengungkapkan transaksi keuangan pemerintah daerah. SAP dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan standar yang konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3. 1 Indikator Pengukuran Standar Akuntansi Pemerintah

Indikator	Pengukuran	Item Pengukuran	Sumber
1. Penerapan SAP Berbasis Akrua	Mengukur apakah pemerintah daerah telah menerapkan basis akrual dalam laporan keuangan.	1. Pengakuan Pendapatan 2. Pengakuan Beban 3. Pengakuan Aset 4. Pengakuan Utang 5. Pengakuan Ekuitas	PP No. 71 tahun 2010
2. Kepatuhan terhadap Regulasi SAP	Menilai sejauh mana laporan keuangan mematuhi Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010.	Penyesuaian pada karakteristik, prinsip, dan unsur-unsur laporan keuangan terhadap PP No. 71 Tahun 2010.	PP No. 71 tahun 2010
3. Kualitas Laporan Keuangan	Mengukur sejauh mana laporan keuangan memenuhi unsur-unsur seperti transparansi, relevansi dan keterbandingan.	1. Memastikan laporan keuangan lengkap, tersedia untuk publik, dan telah di audit oleh BPK. 2. Informasi dalam laporan keuangan dapat membantu pengambilan keputusan. 3. Memastikan format penyajian sesuai dengan standar.	Data BKAD PP No. 71 tahun 2010
4. Evaluasi	Mengukur efektivitas	1. Audit Internal efektif	Wawancara

hasil audit	audit internal dan eksternal dalam memastikan penerapan SAP yang baik.	jika kepatuhan terhadap SAP meningkat, temuan berkurang, dan rekomendasi ditindaklanjuti. 2. Audit eksternal efektif jika entitas mendapat opini WTP, jumlah temuan berkurang, dan rekomendasi BPK dijalankan.	dengan Kepala BKAD
-------------	--	---	--------------------

3.3.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas laporan keuangan adalah tanggung jawab entitas pemerintah untuk menyajikan informasi keuangan yang transparan, tepat waktu, dan andal kepada para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, lembaga pengawas, dan pembuat kebijakan. Akuntabilitas ini mencakup kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, serta kemampuan untuk memberikan penjelasan dan justifikasi atas penggunaan sumber daya publik.

Tabel 3. 2 Indikator Pengukuran Akuntabilitas Laporan Keuangan

Indikator	Pengukuran	Item Pengukuran	Sumber
1. Transparansi	Laporan keuangan dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.	1. Laporan Keuangan tersedia di website resmi pemerintah daerah. 2. Dokumen dapat diunduh tanpa perlu registrasi atau izin khusus.	Website resmi pemerintah daerah.
2. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi	Memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan SAP.	1. Komponen laporan keuangan lengkap. 2. Kesesuaian dengan PP dan permendagri 3. Laporan keuangan harus diaudit oleh BPK setiap tahun.	PP No. 71 tahun 2010 Permendagri No. 64 Tahun 2013 Permendagri No. 90 Tahun 2019
3. Keandalan Laporan	Laporan keuangan menggambarkan	1. Informasi laporan keuangan	PP No. 71 tahun 2010

Keuangan	kondisi yang sebenarnya.	menggambarkan dengan tepat transaksi dan peristiwa yang relevan. 2. Informasi yang disajikan dapat diuji kebenarannya.	
4. Partisipasi Publik	Melihat sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengawasan keuangan daerah.	1. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. 2. Penggunaan platform digital untuk melaporkan masalah dan memberikan masukan terkait keuangan daerah	Wawancara dengan Kepala BKAD

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dan mendukung kelengkapan informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga metode yaitu :

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen pada kab. Toraja Utara. Seperti dokumen laporan keuangan di kantor BPKD di antaranya.

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

b. Observasi Laporan Keuangan

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung laporan-laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, untuk memahami tentang struktur, isi, dan informasi lainnya.

c. Wawancara

Untuk melengkapi data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi, dilakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan Ibu Etha Yohanis Lande, S.E, M.Si selaku plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun pertanyaan yang akan diajukan:

- 1) Bagaimana peran audit internal dalam memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)?
- 2) Apakah jumlah temuan dari audit internal mengalami penurunan dari tahun ke tahun? Apa penyebabnya?
- 3) Sejauh mana rekomendasi dari auditor internal ditindaklanjuti oleh SKPD atau unit terkait?
- 4) Apakah pemerintah daerah sudah rutin mendapatkan opini dari BPK? Apa opini yang diterima dalam beberapa tahun terakhir?
- 5) Bagaimana perubahan jumlah temuan dari BPK selama beberapa tahun terakhir? Apakah ada tren penurunan?
- 6) Apa saja langkah yang dilakukan dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK?
- 7) Apakah masyarakat di wilayah ini rutin dilibatkan dalam musrenbang setiap tahun?
- 8) Seberapa aktif masyarakat memberikan masukan terkait penganggaran atau prioritas pembangunan?
- 9) Apakah pemerintah daerah menyediakan platform digital untuk menerima laporan atau masukan dari masyarakat terkait keuangan daerah?
- 10) Apakah masyarakat cukup mengetahui dan memanfaatkan platform tersebut?

3.5 Prosedur Analisis

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kuantitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun prosedur analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data melalui dokumentasi, observasi laporan keuangan, dan wawancara
2. Menganalisis kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah
3. Membandingkan laporan keuangan dengan peraturan atau teori yang ada
4. Mengevaluasi laporan keuangan terhadap akuntabilitas.
5. Membuat kesimpulan secara menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh